MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

MENGURAI TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Kevin Aprillio Lallo*, Muh. Yusuf, Nina Yusnita Yamin, Muhammad Din
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Palu
*Correspondent Author, email:
kevinaprilliolallo@gmail.com, muhyusufazis04@gmail.com, nyusnita.untad@gmail.com, didi.kaili83@gmail.com

Abstrak

Efektivitas Dana Desa (DD) sangat bergantung pada tiga pilar utama tata kelola; transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan memahami implementasi ketiga pilar tersebut dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Melalui pendekatan kuantitatif deskriptif, studi ini menganalisis secara sistematis persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan aparat desa terkait transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya dilema, yaitu, meskipun informasi Dana Desa disampaikan melalui media formal seperti baliho dan dokumen anggaran terbuka, yang memberi kesan bahwa transparansi struktural terpenuhi. Namun, mayoritas masyarakat Desa Maku menghadapi kesulitan signifikan dalam memahami rincian anggaran akibat rendahnya literasi keuangan. Konsekuensinya, upaya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan pun berada pada tingkat yang rendah. Akuntabilitas pengelolaan dana desa memang tercapai dari sisi akuntabilitas formal. Adanya kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program. Namun keterbatasan pemahaman masyarakat telah menjadi penghalang utama bagi terwujudnya transparansi dan partisipasi yang bermakna akuntabilitas sosial. Penyediaan informasi tidak setara dengan transfer pemahaman. Temuan ini memberikan rekomendasi perlunya inisiatif edukasi dan sosialisasi yang intensif, yang dirancang secara kontekstual untuk meningkatkan literasi keuangan dan mendorong keterlibatan warga secara aktif.

Kata Kunci: Dana Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Literasi Keuangan.

Article History
Received: December 2025
Reviewed: December 2025
Published: December 2025

Plagirism checker no 1487
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Fenomena yang tampak di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, menjadi titik awal yang memperlihatkan bagaimana transparansi dan keterlibatan warga dalam pengelolaan dana desa tidak selalu dipahami secara seragam oleh pihak-pihak yang terlibat. Saat peneliti mewawancarai aparat desa, mereka menyampaikan dengan yakin bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan secara terbuka melalui musyawarah dan papan informasi desa. Mereka meyakini bahwa langkah-langkah tersebut sudah cukup menunjukkan komitmen transparansi mereka kepada warga. Namun, ketika peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat desa, muncul sudut pandang yang berbeda: sebagian besar warga mengaku tidak memahami alur penggunaan dana desa, tidak mengetahui rincian anggaran, dan merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam pengawasan maupun pengambilan keputusan. Bahkan beberapa warga menyatakan bahwa meskipun mereka mendengar ada musyawarah desa, mereka tidak pernah

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

mendapatkan penjelasan yang membuat mereka benar-benar memahami arah penggunaan dana desa. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak pemahaman antara aparat dan masyarakat yang tidak dapat dilihat semata-mata dari dokumen formal.

Fenomena di Desa Maku tersebut ternyata bukan hal yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan pola yang ditemukan di sejumlah penelitian lain di Indonesia. Misalnya, kajian Sabil (2024) menggambarkan bahwa masyarakat sering kali tidak mengetahui isi laporan dana desa karena informasi disampaikan dengan bahasa teknis yang sulit dipahami, sehingga warga merasa tidak memiliki posisi untuk mengawasi anggaran desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan minimnya partisipasi masyarakat bukanlah akibat ketidakpedulian warga, tetapi lebih karena tidak adanya mekanisme komunikasi yang mampu menjembatani pemahaman mereka. Demikian pula, penelitian Hanasi et al., (2024) menunjukkan bahwa desa yang merasa telah menjalankan transparansi administrasi belum tentu berhasil membuat warganya memahami tujuan dan alur penggunaan dana desa. Temuan ini sangat mirip dengan kenyataan di Desa Maku, di mana informasi mungkin tersedia, tetapi tidak selalu dicerna dengan baik oleh masyarakat.

Setelah memperhatikan fenomena di berbagai desa, menjadi jelas bahwa transparansi tidak dapat didefinisikan sebatas penyampaian informasi. Dalam perspektif teori persepsi publik, masyarakat memaknai informasi berdasarkan pengalaman hidup, tingkat literasi, serta kedekatan mereka terhadap proses pembangunan. Penelitian Sabil (2024) menekankan bahwa persepsi publik terhadap pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh cara informasi dikomunikasikan, bukan hanya oleh ketersediaan data itu sendiri. Oleh karena itu, penyampaian laporan atau pemasangan papan informasi tidak otomatis menumbuhkan rasa percaya jika warga tidak dibimbing untuk memahami konteks dan makna dari informasi tersebut. Dalam konteks pengelolaan dana desa, pemahaman masyarakat sangat penting karena tanpa pemahaman, warga tidak merasa termotivasi untuk mengawasi atau memberikan masukan terhadap pembangunan desa.

Pada tingkat yang lebih luas, tata kelola pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem akuntabilitas publik yang menuntut keterbukaan, dialog, dan partisipasi. Sehingga, keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya diukur dari pelaksanaan aturan administrasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa memiliki ruang untuk memahami dan mengawal prosesnya. Santoso et al., (2024) menjelaskan bahwa masyarakat lebih mudah menerima dan mendukung program pembangunan ketika pemerintah desa mampu melakukan komunikasi publik yang menyentuh, bukan sekadar prosedural. Dengan demikian, efektivitas transparansi dan partisipasi dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti budaya komunikasi, kedekatan emosional warga dengan aparat desa, serta keterampilan aparat dalam menjelaskan program secara sederhana.

Fenomena yang ditemukan di Desa Maku memperlihatkan bahwa meskipun pemerintah desa meyakini bahwa mereka sudah bersikap transparan, masyarakat sebagai penerima manfaat belum merasakan keterlibatan dan pemahaman yang memadai. Warga tidak menolak pembangunan; mereka justru ingin mengetahui lebih dalam agar dapat terlibat. Namun, minimnya penjelasan yang sistematis membuat masyarakat merasa jauh dari proses pengelolaan dana desa. Situasi ini menggambarkan adanya kesenjangan persepsi yang hanya bisa dipahami melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan mendengarkan suara kedua pihak secara langsung dan mendalam. Dalam konteks ini, suara warga Desa Maku memberikan realitas yang memperkaya pemahaman mengenai bagaimana kebijakan transparansi dipersepsi di tingkat lokal.

Berdasarkan penelusuran literatur dan hasil temuan lapangan, tampak bahwa penelitian mengenai transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sudah banyak

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

dilakukan, tetapi sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek administratif dan belum mengkaji kesenjangan persepsi secara mendalam. Belum banyak penelitian yang menempatkan pengalaman aparat dan masyarakat dalam satu bingkai analisis untuk melihat bagaimana dua sudut pandang itu membentuk pemaknaan terhadap transparansi. Di wilayah Kabupaten Sigi khususnya, penelitian sejenis hampir tidak ditemukan, sehingga dinamika yang terjadi di Desa Maku belum pernah terdokumentasi secara akademik. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menghadirkan analisis kualitatif yang menggali persepsi aparat desa serta masyarakat secara bersamaan, sehingga dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai bagaimana transparansi dan keterlibatan warga dipahami dalam praktik pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena transparansi pemerintahan desa di Desa Maku. Metode kuantitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan karakteristik yang ada berdasarkan data numerik yang dikumpulkan. Melalui analisis statistik, penelitian ini tidak hanya menggambarkan keadaan yang terjadi, tetapi juga memberikan pemahaman lebih mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap transparansi yang diterapkan oleh aparat desa.

Menurut Zulfikar et al. (2024), penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang fenomena yang diteliti tanpa mencari hubungan sebab-akibat. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui observasi langsung dan kuisioner yang disebarkan kepada masyarakat Desa Maku. Kuisioner ini berisi pertanyaan yang dirancang untuk menggali pandangan masyarakat mengenai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh aparat desa. Setelah kuisioner terkumpul, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang tingkat transparansi yang dirasakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan panduan yang diberikan oleh Widodo (2023), dalam penelitian kuantitatif deskriptif, penting untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data valid dan reliabel. Oleh karena itu, kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini disusun dengan memperhatikan kriteria validitas dan reliabilitas, untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sampling acak sederhana (simple random sampling) untuk memilih responden dari masyarakat Desa Maku. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dengan menggunakan teknik ini, setiap anggota masyarakat memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden, yang diharapkan dapat menghasilkan data yang representatif dan objektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini menjelaskan temuan penelitian yang diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan pengisian kuesioner oleh masyarakat Desa Maku. Peneliti membahas tiga variabel utama, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa. Pembahasan dimulai dari aspek transparansi karena variabel ini merupakan dasar dari keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan menilai pengelolaan Dana Desa secara objektif.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Gambar 1. Dokumentasi Baliho APBDes di Depan Kantor Desa Maku 2023

Pemerintah Desa Maku melaksanakan transparansi anggaran dengan memajang baliho APBDes di depan kantor desa sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Baliho tersebut menampilkan rincian pendapatan dan belanja Dana Desa yang direncanakan maupun direalisasikan pada tahun berjalan. Aparat desa menempatkan baliho pada lokasi yang mudah terlihat sehingga masyarakat dapat melihat informasi anggaran saat melintas di depan kantor desa. Praktik ini sejalan dengan Sulistyowati & Nataliawati, (2022) yang menyebutkan bahwa *"pemerintah desa wajib memasang publikasi anggaran desa, baik itu dari dana desa maupun alokasi dana desa melalui pemasangan baliho yang memuat informasi Alokasi Dana Desa untuk setiap rancangan program yang dilaksanakan"* Kutipan tersebut menguatkan bahwa penyediaan baliho APBDes merupakan bentuk transparansi yang secara normatif diharapkan agar informasi keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, langkah Pemerintah Desa Maku menunjukkan upaya untuk memastikan akses informasi publik tersedia secara jelas, terbuka, dan mudah dijangkau oleh warga.

Gambar 2. Kunjungan Langsung di Kantor Desa untuk Mengakses Dokumen Laporan Desa Maku

Peneliti juga melakukan kunjungan langsung ke kantor Desa Maku dan memperoleh akses penuh terhadap dokumen laporan anggaran desa setelah bertemu dengan Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Akses ini menunjukkan bahwa aparat desa bersedia membuka laporan anggaran kepada siapa pun yang membutuhkan, termasuk masyarakat umum. Temuan ini sejalan dengan prinsip transparansi sebagaimana dinyatakan oleh Hendrawati & Pramudianti, (2020) bahwa *"transparansi adalah setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat, termasuk adanya mekanisme dan akses masyarakat dalam mengajukan tanggapan serta memperoleh informasi anggaran desa"*. Fakta bahwa peneliti dapat melihat dan memeriksa dokumen secara langsung juga memperkuat bahwa masyarakat Desa Maku memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses laporan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

tersebut bila datang ke kantor desa. Hal ini sejalan dengan temuan Nuraeni & Kusuma, (2021) yang menjelaskan bahwa transparansi anggaran desa tercermin dari *"informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik antara perangkat desa dan masyarakat"*. Dokumentasi kunjungan tersebut memperlihatkan bahwa transparansi di Desa Maku tidak hanya dilakukan melalui media visual seperti baliho, tetapi juga melalui penyediaan dokumen fisik yang dapat diperiksa langsung oleh warga sebagai wujud keterbukaan pemerintah desa.

Gambar 3. Pengambilan Data Melalui Kuisioner Masyarakat Desa Maku

Hasil pengambilan data kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mengetahui keberadaan baliho APBDes, tetapi tidak memahami isi informasi angggaran yang tertera. Banyak responden menyatakan bahwa mereka melihat baliho tersebut setiap hari, tetapi tidak mampu menafsirkan angka, grafik, atau istilah keuangan karena literasi keuangan yang masih rendah. Dalam wawancara, beberapa responden menyampaikan bahwa anggota keluarga lain, seperti suami, lebih memahami informasi tersebut, sedangkan mereka hanya melihat baliho sebagai simbol keterbukaan tanpa memahami isi rinciannya. Temuan ini memperlihatkan bahwa transparansi secara fisik telah berjalan, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena masyarakat belum mampu mengolah informasi yang dipublikasikan.

Tabel 1. SPSS Descriptive Statistic Transparansi

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TRANS_1	37	3.00	5.00	4.1892	.93802
TRANS_2	37	3.00	5.00	4.3514	.85687
TRANS_3	37	3.00	5.00	3.9189	.92431
TRANS_4	37	3.00	5.00	4.2703	.83827
TRANS_5	37	2.00	5.00	3.9730	.98563
TRANS_TOTAL	37	15	25	20.70	3.471

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata transparansi berada pada kisaran 3,91–4,35, yang berarti masyarakat menilai transparansi aparat desa sudah cukup baik. Namun demikian, dua indikator TRANS_3 (mean = 3,9189) dan TRANS_5 (mean = 3,9730) memperlihatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Kedua indikator ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap laporan anggaran serta kemampuan desa menyampaikan informasi secara mudah dipahami.

Nilai transparansi yang lebih rendah pada beberapa indikator sebelumnya memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat memang melihat informasi publik seperti baliho APBDes, tetapi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

tidak sepenuhnya memahami isi anggarannya karena literasi keuangan yang masih terbatas. Kondisi ini berdampak langsung pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Ketika informasi tidak benar-benar dipahami, maka minat untuk terlibat dalam musyawarah, pengawasan, maupun pengambilan keputusan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai peran masyarakat, penelitian ini juga mengukur tingkat partisipasi melalui lima indikator seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. SPSS Descriptive Statistics Partisipasi

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PART_1	37	2.00	5.00	3.8378	1.09325
PART_2	37	2.00	5.00	3.7838	1.13370
PART_3	37	2.00	5.00	3.8919	1.12506
PART_4	37	2.00	5.00	3.8378	1.06754
PART_5	37	2.00	5.00	3.7568	.89460
PART_TOT	37	11	25	19.11	3.784

Pada Tabel *Descriptive Statistics* partisipasi, seluruh indikator partisipasi masyarakat (PART_1 sampai PART_5) menunjukkan nilai minimum 2,00 dan maksimum 5,00. Rentang ini menggambarkan bahwa responden memberikan jawaban yang beragam, mulai dari tingkat partisipasi rendah hingga tinggi. Namun demikian, nilai rata-rata (mean) pada setiap indikator berkisar antara 3,75–3,89, sehingga tingkat partisipasi masyarakat Desa Maku berada pada kategori sedang. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat belum terlibat secara optimal dalam kegiatan pembangunan maupun pengawasan dana desa. Padahal, aparat desa sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan pembangunan berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan warga. Selain itu, nilai standar deviasi yang berada pada kisaran 0,89–1,13 mengindikasikan adanya perbedaan persepsi antarresponden mengenai seberapa besar mereka merasa terlibat. Secara keseluruhan, nilai total partisipasi (PART_TOT) dengan mean 19,11 dari rentang 11–25 menegaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai level cukup, bukan tinggi.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Gambar 4. Bhabinkamtibmas dan Kepala Desa Maku Jalin Kemitraan dengan Masyarakat Penambang Pasir. https://www.polressigi.id/2023/08/bhabinkamtibmas-dan-kepala-desa-maku.html?m=1

Hasil observasi memperlihatkan bahwa aparat desa telah berupaya membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat. Pada foto tersebut terlihat aparat desa sedang berdiskusi secara informal bersama masyarakat yang bekerja sebagai penambang pasir. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sebenarnya membuka ruang dialog dan berharap masyarakat dapat memberikan masukan terkait kondisi pembangunan dan kebutuhan desa. Meskipun demikian, tidak semua warga memiliki keberanian atau pemahaman yang cukup untuk terlibat aktif dalam proses tersebut. Kondisi ini sejalan dengan penegasan Kurniawan, (2025) bahwa *partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata warga*. Temuan pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih berada pada kategori sedang memperlihatkan bahwa ruang dialog yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh warga.

Gambar 5. Musyawarah Desa Maku

Pada foto kegiatan musyawarah desa, tampak bahwa peserta yang hadir merupakan perwakilan masyarakat Desa Maku, bukan seluruh warga. Kehadiran perwakilan ini memang menunjukkan adanya keterlibatan dalam proses perencanaan program desa, namun tidak seluruh masyarakat menerima informasi secara langsung. Berdasarkan wawancara dan observasi, banyak warga yang tidak mengetahui hasil musyawarah karena keterbatasan informasi dan rendahnya kemauan untuk mencari tahu. Temuan ini bertolak belakang dengan pandangan Saputra & Kusumawardani, (2024) yang menegaskan bahwa *"Partisipasi masyarakat merupakan bentuk andil masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat tidak hanya ikut serta dalam kegiatan, namun juga ikut serta dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, memonitor sampai tahap penilaian akhir."* Kondisi tersebut memperkuat hasil pada tabel bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum optimal, sebab hanya sebagian warga

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

yang terlibat sementara mayoritas tidak memperoleh pemahaman yang memadai mengenai proses pengambilan keputusan di desa..

Gambar 6. Pengambilan Data Melalui Kuisioner Masyarakat Desa Maku

Berdasarkan kuisioner dan wawancara yang dilakukan kepada warga Desa Maku, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui adanya musyawarah desa namun mereka tidak memahami mekanisme pengelolaan maupun pengawasan dana desa secara mendalam. Banyak responden menyatakan bahwa mereka hanya mengikuti kegiatan desa secara umum tanpa mengetahui detail penganggaran atau prosedur pelaksanaannya. Kondisi ini sejalan dengan temuan Setyawati & Ferdinand, (2020) bahwa *"masyarakat desa tidak memaknai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa dengan standar yang tinggi seperti halnya dalam pengelolaan keuangan skala besar"*, sehingga informasi keuangan desa cenderung tidak benar-benar dipahami oleh publik. Beberapa warga bahkan menyampaikan bahwa mereka "hanya sebagai ibu rumah tangga", sehingga urusan pengawasan dana desa dianggap sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan membuat masyarakat kesulitan membaca dokumen anggaran maupun laporan realisasi dana desa. Faktor-faktor ketidaktahuan inilah yang menyebabkan nilai rata-rata partisipasi dalam tabel berada pada kategori sedang dan tidak mencapai nilai tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah menyediakan ruang diskusi dan melibatkan warga dalam musyawarah, tingkat partisipasi masyarakat masih belum merata. Sebagian warga belum memiliki keberanian ataupun pemahaman yang cukup untuk menyampaikan pendapat terkait pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif melalui sosialisasi, edukasi keuangan desa, serta pemberdayaan masyarakat agar warga mampu terlibat secara lebih aktif dalam proses pembangunan maupun pengawasan. Partisipasi yang kuat dari masyarakat inilah yang nantinya menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas penggunaan dana desa di Desa Maku tampak melalui konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah desa (RPJMDes) dan dokumen penganggaran tahunan (APBDes). Hasil telaah menunjukkan bahwa dalam RPJMDes Desa Maku tercantum permasalahan mengenai kurangnya sarana pengajian bagi masyarakat. Pemerintah desa kemudian menindaklanjuti kebutuhan tersebut dengan merumuskan program pembangunan taman pengajian sebagai bentuk pemenuhan sarana keagamaan. Program ini dijabarkan secara konkret dalam APBDes melalui alokasi belanja pembangunan sarana prasarana keagamaan. Keselarasan antara perencanaan dan penganggaran tersebut memperlihatkan praktik akuntabilitas yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

15	Kurangnya sarana pengajian	- Pekerja - Pasir - Batukali

Gambar 7. Tabel Daftar Masalah Dari Potret Desa Yang Tercantum Di RPJMdes Tahun 2023-2028 Desa Maku

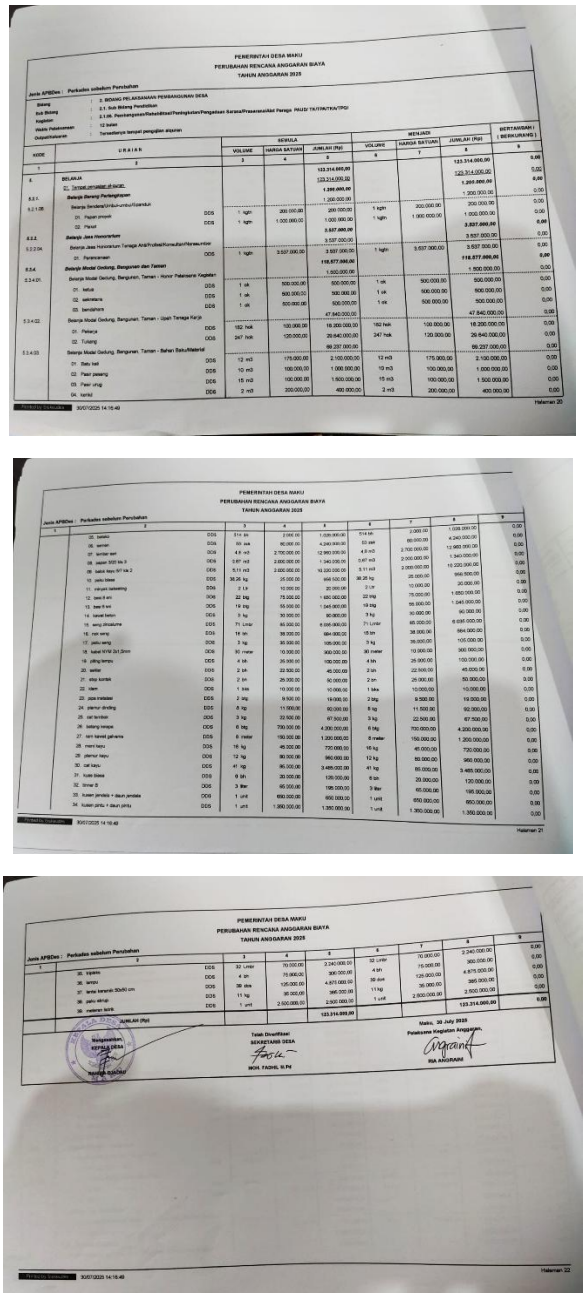

Gambar 8. APBDes Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Output Tersedianya Tempat Pengajian Alquran Desa Maku

Penjabaran anggaran ditampilkan secara transparan melalui rincian volume, harga satuan, total anggaran, serta perubahan sebelum dan sesudah penetapan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Bentuk akuntabilitas lainnya terlihat dari pelaksanaan pembangunan fisik *Taman Pengajian Al-Qur'an*. Pembangunan tersebut tidak hanya tercatat dalam APBDes, tetapi juga telah

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

direalisasikan di lapangan sebagaimana terlihat pada dokumentasi pembangunan yang diperoleh peneliti.

Gambar 9. Realisasi Pembangunan Taman Pengajian Quran (TPQ) Desa Maku

Adanya realisasi pembangunan yang sesuai dengan rencana anggaran memperlihatkan bahwa pemerintah desa menjalankan prinsip akuntabilitas kinerja, yaitu kesesuaian antara perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan di lapangan. Untuk memperkuat temuan lapangan, peneliti juga melakukan penilaian kuantitatif terhadap persepsi masyarakat mengenai akuntabilitas pemerintah desa. Berikut ini disajikan hasil statistik deskriptif berdasarkan lima indikator akuntabilitas:

Tabel 3 SPSS Descriptive Statistics Akuntabilitas

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AKTB_1	37	3.00	5.00	4.1351	.78748
AKTB_2	37	3.00	5.00	4.1622	.76425
AKTB_3	37	3.00	5.00	4.1892	.70071
AKTB_4	37	3.00	5.00	4.1892	.87679
AKTB_5	37	3.00	5.00	4.1351	.91779
AKTB_TOT	37	15	25	20.81	3.349

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 37 responden, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pemerintah Desa Maku dinilai tinggi oleh masyarakat. Nilai rata-rata pada setiap indikator akuntabilitas (AKTB_1 sampai AKTB_5) berada pada kisaran 4.13 hingga 4.18 dari skala maksimum 5.00. Rentang nilai tersebut menggambarkan bahwa masyarakat memberikan penilaian positif terhadap keterbukaan informasi, kejelasan penggunaan anggaran, dan kesesuaian pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan. Nilai total akuntabilitas (AKTB_TOT) menunjukkan rata-rata sebesar 20.81 dari skor maksimum 25, sehingga mempertegas bahwa akuntabilitas pemerintah desa berada pada kategori baik. Selain itu, nilai standar deviasi yang berkisar antara 0.70 hingga 0.91 menunjukkan bahwa persepsi masyarakat relatif konsisten dan tidak menunjukkan perbedaan penilaian yang signifikan antarresponden. Dengan demikian, data kuantitatif ini mengonfirmasi temuan lapangan bahwa pemerintah Desa Maku telah menjalankan akuntabilitas secara memadai.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Maku telah berupaya menerapkan transparansi melalui baliho APBDes dan pemberian akses dokumen anggaran. Namun, masyarakat masih kesulitan memahami informasi karena rendahnya literasi keuangan, sehingga partisipasi mereka dalam pengawasan dan pengambilan keputusan tetap rendah meskipun ruang dialog telah disediakan. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sebenarnya sudah tampak melalui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi keterbatasan pemahaman masyarakat membuat tujuan transparansi dan partisipasi belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pengelolaan anggaran desa agar masyarakat dapat memahami dan terlibat aktif dalam pembangunan desa.

Sebagai saran, pemerintah desa perlu menyajikan APBDes dengan tampilan yang lebih menarik, misalnya melalui baliho beranimasi dan penyebaran baliho di beberapa titik strategis. Pemerintah desa juga dapat membuat *APBDes Card* berisi ringkasan anggaran yang sederhana dan mudah dipahami. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memperluas akses informasi, mendorong partisipasi, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Widodo, S. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*. Science Techno Direct.

Zulfikar, R., et al. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori, Metode, dan Praktik*. Widina Media Utama.

Hanasi, R. A., Bumulo, S., & Mobilingo, R. (2024). *Persepsi Masyarakat Terkait Implementasi Penggunaan Dana Desa di Desa Monggolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo*. *1*(c), 91–100.

Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, *12*(2), 101–102.

Kurniawan, M. (2025). Akuntansi Partisipatif Dalam Pengelolaan Dana Desa. *JURNAL ECONOMINA Volume*, *4*, 297–303.

Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *9*(3), 1–2. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214

Sabil, I. (2024). *ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA KANTOR DESA LASSANG BARAT KECAMATAN POLOMBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR*.

Santoso, E. B., Prasetyo, A., & Gaol, L. L. (2024). *Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi*. *4*(1), 126–140.

Saputra, A. V., & Kusumawardani, A. (2024). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Bergas Kidul Kabupaten Semarang*. *17*(2), 164–175.

Setyawati, V. D., & Ferdinand, D. Y. Y. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara Kualitatif. *JURNAL AKUNTANSI &*

EKONOMI FE UN PGRI Kediri, *5*(2), 125–126.

Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *6*(April), 1798–1808.